

# Dibalik Oligopoli Pasar Susu

*by* Nanik Sri Setyani

---

**Submission date:** 29-May-2023 02:08PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2104389131

**File name:** jurnal\_eksis\_2008.pdf (2.31M)

**Word count:** 1897

**Character count:** 12352

ISSN : 1907-7513

**ek** jurnal riset ekonomi & bisnis

**eksis**

**Vol. III No. 3 Oktober 2008**

DAFTAR ISI

- Nurdiana* ANALISA SEGMENTASI PASAR BERDASARKAN KARAKTERISTIK PERILAKU NASABAH PENGGUNA KREDIT PADA BADAN KREDIT DESA (BKD) DI WILAYAH SEMBUH – PERAK - JOMBANG
- Siti Zuhroh  
Lusiana* ANALISA FAKTOR – FAKTOR YANG DIPERTIMBANGKAN KONSUMEN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENJADI NASABAH TAHAPAN DI BANK BCA CABANG MOJOKERTO
- Widajang Indartono* PENGARUH BIAYA PROMOSI TERHADAP HASIL PENJUALAN PADA PERUSAHAAN GARMENT CV “AZ-ZAHROH” DI DIWEK JOMBANG
- Rita Mutiarni* “PRODUCT AND PRICE” SERTA PENGARUHNYA TERHADAP VOLUME PRODUKSI (Studi Pada Perusahaan Percetakan “Kinara – Grafika” Jombang)
- Mey Juliana* ANALISA BIAYA STANDAR SEBAGAI ALAT PENILAI BIAYA PRODUKSI PADA PERUSAHAAN KARTON PT. KEMASAN CIPTATAMA SEMPURNA
- Nanik Sri Setyani* DIBALIK OLIGOPOLI PASAR SUSU
- Abdul Rochim* PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP SEMANGAT KERJA KARYAWAN (Studi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) Pabrik Jombang)
- Yunip M.S* PENERAPAN AKUNTANSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PADA KUD HIKMAH JOMBANG

## Dibalik Oligopoli Pasar Susu

Nanik Sri Setyani

### Abstract

As theory, Oligopoly system is a relatively different structure compare with three others (monopoly, monopolistic, and perfect market). The oligopolies have to pay attention their rivals, and the others market structure only watch from their consumers. .. The oligopoly in milk market of this country doesn't run well, if it's watched from the breeder, because there is dependency to the market as the only potential buyer. Hence, the role of Milk Industry (Indusri Pengolahan Susu – IPS) is really dominant. Usually, the price from IPS is lower than the price of milk production. To stop the dependency of breeder, the government has to try to increase the improvement of breeder. There are 3 (three) main policy that has to be done: 1). The government has to say “No” for market liberalization especially for milk market, 2). The government has to protect the breeder, 3). It is needed, to do revitalization more seriously in breeding sector. Besides that, the building of infrastructures in village is important to support milk production efficiently.

Keywords: Oligopoly, revitalization.

Pasar Oligopoli secara teori seringkali di anggap struktur pasar yang relatif berbeda dengan ketiga struktur pasar yang lain ( pasar monopoli, monopolistik dan pasar sempurna). Pelaku pasar Oligopoli ( oligopolis ) sangat memperhatikan gerak pesaingnya, sedangkan struktur pasar yang lain hanya melihat dari sisi konsumennya.

Jika salah satu perusahaan dalam pasar oligopoli menurunkan harga maka kurve permintaannya akan patah. Karena penurunan harga yang semula dilakukan bertujuan agar volume penjualan akan naik, ternyata tidak terjadi. Kenaikan volume penjualan tidak sebanyak yang diharapkan/harus terjadi, hal ini dikarenakan perusahaan pesaing, mengikuti jejak mereka untuk menurunkan harga. Bisa diamati pada gambar dibawah ini

Bagaimana dengan proses Oligopoli pasar susu di negara kita, apakah berlaku seperti teori tersebut ? Siapa sebenarnya pelaku oligopoli ? Apakah Nestle, Ultra Jaya, Frisian Flag, Sari Husada dan Indomilk ( sebagai Industri Pengolahan Susu / IPS)? Bagaimana posisi para peternak yang sering tergabung dalam Koperasi Peternak Susu ( KPS )?.

### Pelaku Oligopoli di Pasar Susu Indonesia

Pada awal tahun 2007 terjadi gonjangan berat pada harga susu segar dunia, karena harga naik hingga 74 persen, sehingga harga susu di tingkat konsumen melejit naik hingga dua kali lipat. Kondisi ini ternyata tidak dirasakan oleh para peternak susu di Indonesia secara proposional dengan kenaikan harga dunia tersebut. Mengapa?

Menurut perhitungan Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian, pada periode itu harga susu segar di tingkat peternak hanya naik 22 persen. Artinya, para peternak sapi perah kita hanya menikmati 22 persen dari harga susu dunia. Sementara itu, IPS mendapatkan keuntungan 54 persen dari kenaikan tersebut ditambah dengan dari kenaikan harga jual susu di tingkat konsumen. Ironisnya dalam kondisi yang sebaliknya yaitu ketika harga susu di pasar global turun, para peternaklah yang pertamakali harus menanggung kerugiannya.

Mari kita amati pada awal tahun 2008 ini Nestle menurunkan harga beli susu segar sebesar Rp. 200 hingga Rp. 300 per liter karena harga

susu di pasar global turun. Namun anehnya harga di tingkat konsumen tidak ikut turun. Jadi setiap ada gejolak harga, IPS selalu menjadi pihak yang tidak rugi malah kadang-kadang mengeruk untung.

Kerugian atas gejolak tersebut selalu dibebankan ke pihak peternak dan konsumen. Hal inilah yang perlu kita perhatikan, karena tidak sesuai dengan prinsip berat sama dipikul ringan sama dijinjing, atau tidak sesuai dengan prinsip ekonomi dalam konstitusi kita yang menyatakan perekonomian dibangun atas azas kekeluargaan.

Apakah sudah benar tindakan dari IPS selaku pelaku Oligopoli? Apakah kurve patah yang ada di pasar Oligopoli susu tidak berlaku? IPS selalu dapat mengais keuntungan meskipun harga diturunkan (harga pasar susu dunia turun). Harga naiknya IPS tetap untung besar. KPS sebagai korban. Apakah kegiatan seperti ini wajar? Bagaimana perlindungan terhadap sumber bahan mentah yaitu para peternak?

#### **Posisi Tawar Para Peternak dan Koperasi Susu sangat lemah dihadapan IPS.**

Kondisi di masyarakat perusahaan peternakan besar (> 200 ekor) biasanya mempunyai usaha dari hulu sampai hilir, sedangkan pada peternak kecil (3-10 ekor/peternak) umumnya bergabung dalam wadah Koperasi Peternak Susu (KPS).

KPS menyediakan saprodi (pakan konsentrat, pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan reproduksi seperti IB dan pemeriksaan kebuntingan) dan menampung semua hasil susu yang diproduksi anggotanya kemudian yang dikumpulkan dalam bentuk susu segar langsung ke Industri Pengolahan Susu (IPS).

Karena ketergantungan pasar sebagai satu-satunya pembeli yang bisa diharapkan, maka dalam penentuan harga peran IPS sangat dominan. Umumnya harga susu yang dibeli IPS relatif rendah jika dibandingkan dengan biaya produksi susu.

Dalam 10 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 1998 harga susu segar di tingkat peternak selalu lebih rendah dari pasar global, setiap tahunnya peternak hanya menikmati 62,5 persen dari harga susu di pasar global. Padahal seharusnya peternak di Indonesia bisa menikmati harga susu yang sama dengan harga dunia. Namun hal tersebut tidak terjadi karena margin keuntungan hanya dinikmati IPS. Lantas, sebagai regulator langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah?

#### **Peran Pemerintah dalam Pasar Susu**

Dengan alasan membuat kebijakan yang pro-peternak, pemerintah tampaknya sibuk melakukan liberalisasi pasar nasional, termasuk susu. Pada tahun 1998 Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Salah satu isinya adalah meliberalkan pasar dalam negeri. Tidak lama setelah penandatanganan LoI, terbit Inpres No.4 tahun 1998 tentang koordinasi pembinaan dan pengembangan persusuan nasional. Peraturan tersebut meniadakan peraturan sebelumnya yang berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan dan Koperasi yang dikeluarkan pada tahun 1983. Padahal SKB ini sangat pro-peternak, isinya tentang kewajiban IPS untuk membeli susu dari peternak lokal disamping susu impor sebagai bahan baku Industrinya.

Liberalisasi susu semakin menggilanya dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa sesuai peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bea masuk susu impor harus nol persen pada tahun 2017 mendatang. Liberalisasi ini terus berlanjut hingga pada bulan Agustus 2008 pemerintah menandatangani kesepakatan perjanjian perdagangan bebas negara-negara Asean, Australia dan New Zealand (AANZ FTA

). Dalam perjanjian perdagangan bebas ini, Indonesia dikatakan mendapatkan keuntungan bebas tarif masuk barang ke Australia dan New Zealand, namun tentunya Indonesia juga harus membuka pintu masuk terhadap barang-barang dari Australia dan New Zealand, seperti susu.

Menyusul penandatanganan AANZ FTA ini pada tanggal 13 Februari 2009 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Keuangan No. 19 tahun 2009 tentang penetapan tarif bea masuk atas barang impor produk-produk tertentu. Di mana dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa tarif bea masuk untuk *skim milk powder*, *full cream milk*, *yoghurt*, *buttermilk* dan produk susu lainnya sebesar nol persen!

Dari penjelasan di atas kita mendapat pelajaran bahwa proses liberalisasi pasar susu yang dilakukan sejak tahun 1998 ternyata merugikan peternak susu lokal. Sedangkan yang menikmati keuntungan dari liberalisasi pasar susu adalah IPS yang terdiri dari perusahaan-perusahaan besar, beberapa diantaranya adalah perusahaan-perusahaan transnasional yang kepemilikan sahamnya dikuasai pihak asing.

Sehingga kita tidak hanya tergantung terhadap susu impor saja, lebih jauh dari itu industri pengolahan susu kita sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Padahal susu merupakan sumber protein penting yang ikut menentukan kualitas gizi suatu bangsa. Wajar saja apabila konsumsi rata-rata susu per kapita di Indonesia baru mencapai 9 liter per orang per tahun, sementara negara tetangga Malaysia mencapai 30 liter dan Eropa jauh lebih tinggi lagi yakni 120 liter.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana memutus ketergantungan ini? Tentunya pemerintah harus berupaya mendorong tumbuhnya industri susu nasional yang kuat dan memberikan dukungan penuh terhadap peternakan susu rakyat, karena di Indonesia peternakan rakyat menyumbang lebih dari 90 persen produksi susu nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut ada tiga kebijakan utama yang harus diambil pemerintah. *Pertama*, pemerintah harus berani mengatakan tidak kepada liberalisasi pasar pertanian secara umum, dan pasar susu lebih khususnya. Liberalisasi pasar pertanian pada faktanya membiarkan petani dan peternak kecil kedalam persaingan yang tidak setara. Sudah bukan rahasia umum lagi apabila negara-negara maju memberikan subsidi kepada para petaninya secara besar-besaran sehingga produk-produk mereka bisa bersaing di tingkat global yang tujuan akhirnya untuk mendominasi pasar sehingga pada gilirannya mereka bisa mengendalikan harga. Sebagai alternatifnya pemerintah harus bisa mengusulkan proposal pasar berkeadilan atau terkendali ke dalam setiap perundingan-perundingan perdagangan.

*Kedua*, pemerintah harus melindungi peternakan rakyat. Misalnya dengan memberlakukan kembali ketentuan yang mewajibkan IPS untuk membeli susu segar dari petani lokal dalam porsi yang lebih layak dan diberlakukan secara ketat. Ketentuan ini dalam jangka panjang akan memberikan insentif terhadap peternak lokal untuk memproduksi susu lebih banyak lagi.

*Ketiga*, perlu dilakukan revitalisasi yang lebih serius di sektor peternakan. Diseminasi teknologi dan penyuluhan harus terus dilakukan secara intensif untuk membantu peternak meningkatkan kualitas produksinya. Pemerintah juga perlu mengembangkan industri susu nasional sehingga IPS tidak hanya dikuasai segelintir perusahaan yang membentuk oligopoli kartel seperti saat ini. Disamping itu tentunya perlu pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendukung produksi yang efisien.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana memutus ketergantungan ini? Tentunya pemerintah harus berupaya mendorong tumbuhnya industri susu nasional yang kuat dan

memberikan dukungan penuh terhadap peternakan susu rakyat, karena di Indonesia peternakan rakyat menyumbang lebih dari 90 persen produksi susu nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut ada tiga kebijakan utama yang harus diambil pemerintah. *Pertama*, pemerintah harus berani mengatakan tidak kepada liberalisasi pasar pertanian secara umum, dan pasar susu lebih khususnya. Liberalisasi pasar pertanian pada faktanya membiarkan petani dan peternak kecil kedalam persaingan yang tidak setara. Sudah bukan rahasia umum lagi apabila negara-negara maju memberikan subsidi kepada para petaninya secara besar-besaran sehingga produk-produk mereka bisa bersaing di tingkat global yang tujuan akhirnya untuk mendominasi pasar sehingga pada gilirannya mereka bisa mengendalikan harga. Sebagai alternatifnya pemerintah harus bisa mengusulkan proposal pasar berkeadilan atau terkendali ke dalam setiap perundingan-perundingan perdagangan.

*Kedua*, pemerintah harus melindungi peternakan rakyat. Misalnya dengan memberlakukan kembali ketentuan yang mewajibkan IPS untuk membeli susu segar dari petani lokal dalam porsi yang lebih layak dan diberlakukan secara ketat. Ketentuan ini dalam jangka panjang akan memberikan insentif terhadap peternak lokal untuk memproduksi susu lebih banyak lagi.

*Ketiga*, perlu dilakukan revitalisasi yang lebih serius di sektor peternakan. Diseminasi teknologi dan penyuluhan harus terus dilakukan secara intensif untuk membantu peternak meningkatkan kualitas produksinya. Pemerintah juga perlu mengembangkan industri susu nasional sehingga IPS tidak hanya dikuasai segelintir perusahaan yang membentuk oligopoli kartel seperti saat ini. Disamping itu tentunya perlu pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendukung produksi yang efisien.

## PENUTUP

Untuk memutus ketergantungan peternak susu, pemerintah harus berupaya mendorong tumbuhnya industri susu nasional yang kuat dan memberikan dukungan penuh terhadap peternakan susu rakyat. Ada tiga kebijakan utama yang harus diambil pemerintah.

1. Pemerintah harus berani mengatakan tidak kepada liberalisasi pasar pertanian secara umum, dan pasar susu lebih khususnya.
2. Pemerintah harus melindungi peternakan rakyat.
3. Perlu dilakukan revitalisasi yang lebih serius di sektor peternakan. Disamping itu tentunya perlu pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendukung produksi yang efisien.

## Tinjauan Pustaka

Ahmad Ya'kub, 2009, *Oligopoli Pasar Susu Rugikan Petani Kecil*, [www.spi.or.id](http://www.spi.or.id)

Pratama Rahardja, 2005, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta, FE UI

Thomson Learning, *Ekonomi Manajerial*, 2005, Salemba Jakarta

Undang Undang Republik Indonesia, nomor 5 tahun 1999, tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat*

..., 2009, *Oligopoli Pasar Susu Rugikan Petani Kecil*, [www.revolusound.org](http://www.revolusound.org)

..., 2007, KPPU : *Harga Susu Naik karena Perusahaan Besar Kuasai Distribusi*, [www.eramuslim.com](http://www.eramuslim.com)

..., 2007, *Masa Depan Susu*, [www.dyandra.com](http://www.dyandra.com)

# Dibalik Oligopoli Pasar Susu

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://indiraputrinegari.blogspot.com">indiraputrinegari.blogspot.com</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://repository.ipb.ac.id">repository.ipb.ac.id</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://romailprincipe.com">romailprincipe.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://igj.or.id">igj.or.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://blogs.unpad.ac.id">blogs.unpad.ac.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://masyudiks.wordpress.com">masyudiks.wordpress.com</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://beritamatarama.blogspot.com">beritamatarama.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On